

**LAPORAN**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI**  
**PEMERINTAH (LAKIP)**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**TAHUN 2017**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**PANGKALPINANG**

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan KaruniaNya Jualah dapat disusun sekaligus diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 ini merupakan media pertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam pencapaian Visi dan Misi dan sekaligus evaluasi pencapaian kinerja yang didalamnya berisi informasi tentang uraian pertanggungjawaban mengenai keberhasilan ataupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya di tahun yang bersangkutan serta kinerja program/kegiatan memuat aspek pengelolaan keuangan, SDM serta sarana prasarana.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017 disusun sebagai sebuah evaluasi pelaksanaan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2022.

Demikian, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disampaikan, dengan maksud dapat memberikan manfaat baik sebagai informasi maupun bahan evaluasi kinerja, serta umpan balik perbaikan dimasa-masa mendatang. Segala kekurangan dan keterbatasannya, akan kami sempurnakan di tahun mendatang.

Pangkalpinang,       Maret 2017

**KEPALA DINAS  
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**Ir. Hj. ELFIYENA**

NIP. 19620915 199003 2 001

## **IKHTISAR EKSEKUTIF**

LAKIP ini adalah bentuk akuntabilitas (pertanggungjawaban) dan penilaian pencapaian kinerja berbagai program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017, serta pencapaian indikator sasaran tahun 2017. Total alokasi dana SKPD Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah pada APBD Induk sebesar Rp13.480.938.211,86 dan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 menjadi Rp13.773.923.464,00 dengan realisasi keseluruhan sebesar Rp13.199.835.292,00 atau 95,02%. Untuk pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp117.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp133.375.000,00 atau 113,70%. Pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 dapat dikatakan telah dilaksanakan dengan baik, dengan pencapaian fisiknya rata-rata 100%.

Pelaksanaan kegiatan dan program dari rencana kinerja (DPA) tahun 2017 secara keseluruhan dicapai 98,00% yaitu dari 40 kegiatan yang direncanakan terealisasi sebanyak 38 kegiatan. Program yang direncanakan 9 item dan terealisasi selutuhnya. Dari 8 (delapan) indikator kinerja SKPD yang telah ditetapkan pada tahun 2017, terdapat 4(empat) indikator yang capaiannya dalam kategori berhasil dengan persentase capaian lebih dari 100%, 1 (satu) indikator masih dalam kategori kurang berhasil dan 3 (tiga) indikator yaitu pertumbuhan koperasi aktif, pertumbuhan UKM dan peningkatan jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah terkesan dibawah nol (minus) tapi kondisi sebenarnya bukan tidak adanya pertumbuhan tapi karena adanya perubahan basis data (existing) tentang data UKM yang ada di kabupaten/kota sehingga hasil yang dicapai tidak bisa dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk pertumbuhan koperasi aktif tidak bisa dihitung karena jumlah koperasi yang tumbuh (19 koperasi) lebih kecil bila dibandingkan dengan koperasi yang tidak aktif (40 koperasi).

Prestasi kerja tingkat Nasional yang diraih ditahun 2017 diantaranya:

1. Penghargaan Bhakti Koperasi dari Menteri Koperasi dan UKM RI :
  - a. Hasanuddin, S.E., M.M. (Kepala Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum .....	2
1.3 Gambaran Umum Organisasi .....	3
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS	
2.1 Visi dan Misi .....	9
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis .....	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2017 .....	22
3.2 Pengukuran Pencapaian Kinerja Kegiatan Tahun 2017 .....	23
3.3 Akuntabilitas Keuangan .....	44
3.4 Analisis Kinerja .....	51
BAB IV PENUTUP .....	53

### LAMPIRAN

DAFTAR ASET DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwiibawa (*Good Governance and Clean Government*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas dan legitimate agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sejalan dengan itu, dalam rangka pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi azas kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, asas keterbukaan, azas proporsionalitas, azas profesionalitas dan azas akuntabilitas. Menurut penjelasan Undang-undang tersebut, azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010. Hal ini merupakan bagian dari Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik bersih dan berwiibawa sebagaimana telah diamanahkan oleh rakyat melalui Tap MPR Nomor IX Tahun 1998.

## **1.2 Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/1X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
10. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE-31/M.PAN/XII/ 2004 tentang Penetapan Kinerja;
11. KepMen PAN No. 135 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
12. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/01/M.PAN/01/ 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010;
16. Perda Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

### **1.3 Gambaran Umum Organisasi**

Menurut Peraturan Perda Nomor 18 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur dan Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

#### **1.3.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi**

##### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

###### **1. Tugas Pokok**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi.

###### **2. Fungsi**

Dalam Penyelenggaraan tugas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

##### **B. Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada bab XVI bagian kesatu pasal 258, susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat membawahkan:
  1. Sub Bagian Umum;
  2. Sub Bagian Perencanaan.
- c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Membawahkan :
  1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
  2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan;
  3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan.
- d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil membawahkan:
  1. Seksi Fasilitasi Usaha Kecil;
  2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Kecil;
  3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.
- e. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi membawahkan:
  1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
  2. Seksi Kepala Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi;
  3. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPTD)

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Struktur Organisasi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, UPTD Balai Latihan Perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari:

  - a. Kepala Balai;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
  - d. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

### **1.3.2 Sumber Daya Manusia dan Asset SKPD**

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2017 dalam melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintahan didukung sebanyak 86 orang pegawai (PNS dan PHL), dengan status kepegawaian 50 orang PNS. Jumlah tenaga honorer pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 berjumlah 36 orang. Kualifikasi Pendidikan Pegawai S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 29 orang, D3 sebanyak 7 orang, SMU sebanyak 7 orang. Berdasarkan eselonering yang menduduki jabatan eselon II sebanyak 1 orang, eselon III sebanyak 5 orang dan eselon IV sebanyak 14 orang. Klasifikasi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 berdasarkan jenjang pendidikan, eselonering dan klasifikasi berdasarkan golongan adalah seperti tabel dibawah ini :

**Tabel 1.1 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PNS/CPNS) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Doktoral/ S3	-	-	-
2	Pasca Sarjana/ S2	4	3	7
3	Sarjana / S1	15	14	29
4	Diploma-IV	-	-	-
5	Diploma-III	2	5	7
7	SLTA	5	2	7
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>	<b>24</b>	<b>50</b>

**Tabel 1.2 Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan (PHL) pada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sarjana / S1	6	2	8
2	Diploma-III	3	1	4
3	SLTA	11	13	24
<b>JUMLAH</b>		<b>20</b>	<b>10</b>	<b>30</b>

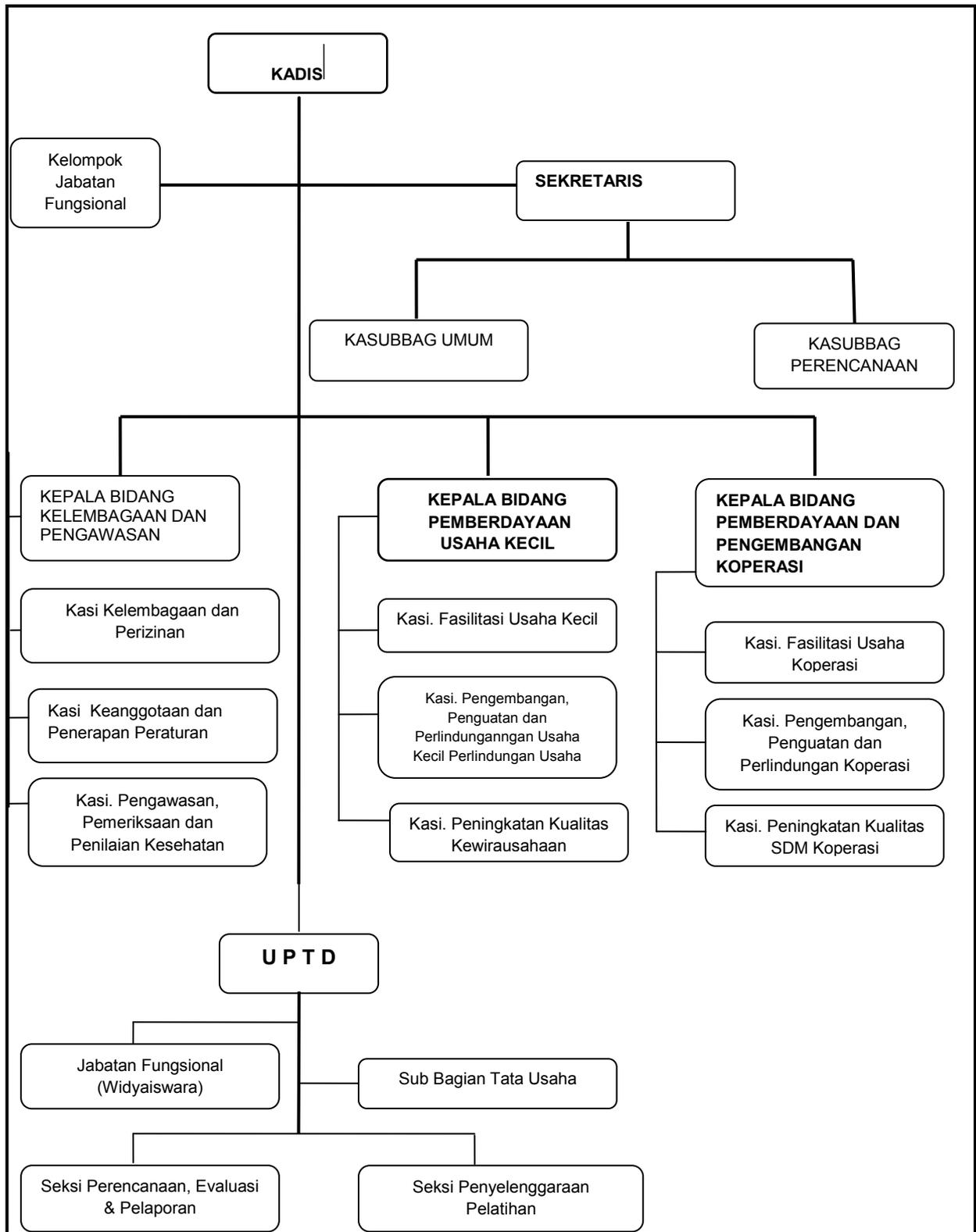
**Tabel 1.3 Klasifikasi Eselon Pegawai PNS/CPNS Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2017**

No	Tingkat Eselon	Jumlah Pegawai		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II A	-	1	1
2	II B	-	-	-
3	III A	3	2	5
4	III B	-	-	-
5	IV A	8	6	14
6	IV B	-	-	-
7	Non Eselon	14	15	29
8	Fungsional	1	-	1
<b>JUMLAH</b>		<b>26</b>	<b>24</b>	<b>50</b>

**Tabel 1.4 Klasifikasi Keadaan Pegawai PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak Dinas Koperasi, UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017**

No	Pendidikan	Golongan					Jumlah
		Kontrak	I	II	III	IV	
1	SD	-	-	-	-	-	-
2	SLTP	-	-	-	-	-	-
3	SLTA	24	-	5	2	-	31
4	Sarjana Muda	4	-	5	1	-	11
5	Sarjana (S1)	8	-	-	26	3	37
6	Pasca Sarjana	-	-	-	4	3	7
<b>Jumlah</b>		<b>36</b>	<b>-</b>	<b>10</b>	<b>33</b>	<b>6</b>	<b>86</b>

Pengorganisasian pegawai pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat digambarkan melalui bagan struktur organisasi berikut ini :



### 1.3.3 Aset SKPD

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di tahun 2017 dalam melaksanakan pengelolaan urusan Pemerintahan didukung aset baik melalui Dana APBD dan Dana APBN (data terlampir).

### **1.3.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut :

#### **KATA PENGANTAR**

#### **RINGKASAN EKSEKUTIF**

#### **DAFTAR ISI**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menulis Tentang Latar Belakang, Dasar Hukum, Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha kecil dan menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Bab ini menuliskan tentang Visi dan Misi SKPD, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Umum, dan Rencana Kinerja

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017**

Bab ini dituliskan tentang Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Analisis Kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB II**

### **PERENCANAAN STRATEGIS**

Perencanaan Strategis adalah merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada dan mungkin akan timbul. Rencana Strategis Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017-2022 merupakan bagian integral dari kebijaksanaan dan program Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan merupakan landasan dan pedoman bagi aparat pelaksana jajaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Rencana Strategis selama kurun waktu lima tahun ingin dicapai, disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini menggunakan analisis SWOT yaitu analisis tentang kekuatan (*strenthgs*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), ancaman/tantangan/kendala (*threat*), serta isu-isu strategis. Atas dasar analisa SWOT diperoleh *Critical Faktor Analisis* (CFA) dan dengan memahami CFA ini tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis ditetapkan dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan tentang masa depan organisasi.

#### **2.1 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

##### **2.1.1 TUJUAN**

1. Pertumbuhan koperasi aktif, sehat dan berkualitas
2. Pertumbuhan dan pengembangan UMKM
3. Peningkatan akses pemasaran dan pembiayaan
4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan UMKM

##### **2.1.2 SASARAN STRATEGIS**

Atas dasar tujuan yang ditetapkan, dirumuskan sasaran untuk 3 Tahun (2017-2019) dengan masing- masing indikator sasaran sebagai berikut :

1. Bertumbuhnya jumlah dan kualitas koperasi serta meningkatnya koperasi sehat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan indikator:
  - a. Persentase pertumbuhan koperasi aktif per tahun;
  - b. Persentase pertumbuhan koperasi sehat per tahun;
  - c. Persentase pertumbuhan koperasi berkualitas per tahun.

2. Meningkatnya pertumbuhan UKM dengan indikator:
  - Persentase pertumbuhan UKM per tahun
3. Meningkatnya jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah dengan indikator :
  - Persentase peningkatan jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah per tahun.
4. Meningkatnya daya saing produk KUKM dalam mengembangkan produk kreatif dan inovatif, berkualitas dan berdaya saing dengan indikator :
  - Jumlah produk UMKM yang memiliki sertifikat halal per tahun.
5. Meningkatnya akses pembiayaan kepada KUKM melalui lembaga pembiayaan dengan indikator :
  - Persentase peningkatan jumlah bantuan permodalan usaha kepada KUKM per tahun.
6. Meningkatnya akses pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan KUKM dengan indikator :
  - Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha KUKM yang mengakses bantuan permodalan per tahun.
7. Meningkatnya jumlah SDM pelaku usaha KUKM yang berkualitas dengan indikator :
  - peningkatan jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang terlatih per tahun.

### **2.1.3 STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN**

Untuk mensukseskan kegiatan yang dilaksanakan maka diperlukan strategi pencapaian yaitu :

1. Mendayagunakan hasil rapat dan hasil koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan sinergi program dan kegiatan antar SKPD Provinsi, dengan Pemerintah Pusat/KL dan dengan Pemerintah dan SKPD Kabupaten/Kota;
2. Menjalin kerjasama dengan pihak lain terkait Pelatihan SDM KUKM (Instansi/lembaga terkait, BUMN/BUMD, sektor swasta);
3. Menciptakan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif;
4. Mengembangkan jiwa kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah;
5. Mengembangkan kapasitas SDM Koperasi dan UKM;
6. Penyusunan regulasi tentang pemberdayaan UKM;

7. Peningkatan pemahaman pelaku usaha untuk mengurus perijinan (sosialisasi/bimtek);
8. Memfasilitasi pelaku usaha agar kualitas produk meningkat (sertifikat halal, pendaftaran HKI, temu usaha/kemitraan);
9. Memfasilitasi pelaku usaha agar kualitas produk meningkat (temu mitra dengan rumah kemas, Bimtek, seminar Promosi dan Pemasaran Produk UMKM Melalui Marketing Online);
10. Memfasilitasi pelaku usaha dalam promosi dan pemasaran produk unggulan (Pameran, fasilitas gallery Khusus UKM di Pusat Perbelanjaan Modern);
11. Memfasilitasi pelaku Koperasi dan UKM untuk dapat mengakses permodalan ke Lembaga Keuangan bank dan Non Bank;
12. Pendampingan bagi pelaku usaha untuk pengembangan usaha (seminar perubahan culturset, magang, bantuan peralatan);
13. Menjalin kerjasama dengan pihak lain terkait Pelatihan SDM KUKM (Instansi/lembaga terkait, BUMN/BUMD, sektor swasta).

#### **2.1.4 RENCANA KINERJA TAHUN 2017**

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1 Formulir Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>
1	Persentase Pertumbuhan koperasi aktif	6 %
2	Persentase Pertumbuhan koperasi sehat	6 %
3	Persentase Pertumbuhan koperasi berkualitas	6 %
4	Persentase Pertumbuhan UKM pertahun	1 %
5	Persentase peningkatan jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah	2 %
6	Peningkatan Jumlah Produk KUKM yang kreatif dan inovatif, berkualitas dan berdaya saing	5 Produk
7	Persentase peningkatan jumlah bantuan permodalan usaha kepada KUKM	4,04 %
8	Persentase peningkatan jumlah pelaku usaha KUKM yang mengakses bantuan permodalan	3,01 %
9	Peningkatan jumlah SDM Koperasi dan UMKM yang terlatih	1 %

Tabel 2.2 Formulir Penetapan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mengoptimalkan Pertumbuhan jumlah dan kualitas koperasi serta meningkatkan koperasi sehat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Pertumbuhan koperasi aktif	6 %
		Pertumbuhan koperasi sehat	6 %
		Pertumbuhan Koperasi berkualitas	6%
2	Meningkatkan pertumbuhan UKM	Pertumbuhan UKM	1%
3	Meningkatkan jumlah usaha Kecil menjadi usaha menengah	Peningkatan usaha kecil menjadi usaha menengah	2%
4	Meningkatkan daya saing produk KUKM dalam mengembangkan produk kreatif dan inovatif, berkualitas dan berdaya saing	Jumlah Produk KUKM yang kreatif dan inovatif, berkualitas dan berdaya saing	5 Produk
5	Meningkatkan Akses Pembiayaan kepada KUKM melalui Lembaga Pembiayaan	Peningkatan jumlah bantuan permodalan usaha kepada KUKM	4,04%
6	Memperluas akses pembiayaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan KUKM	Peningkatan jumlah pelaku usaha KUKM yang mengakses bantuan permodalan	3,01%
7	Meningkatkan Jumlah SDM Pelaku Usaha KUMKM yang berkualitas	Terlatihnya SDM Koperasi dan UMKM	1%

Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, masing-masing Program TA 2017 dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang diuraikan sebagai berikut :

## 1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Penyediaan Jasa Surat Masuk dan Surat Keluar selama 12 bulan;
- 2) Meningkatnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air Perkantoran Selama 12 Bulan;
- 3) Meningkatnya Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan Kantor selama 12 bulan;
- 4) Meningkatnya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor selama 12 bulan;
- 5) Meningkatnya Penyediaan Alat tulis kantor selama 12 bulan;
- 6) Meningkatnya Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan selama 12 bulan;
- 7) Meningkatnya Penyediaan Komponen Intalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 12 bulan;
- 8) Meningkatnya Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan selama 12 bulan;
- 9) Melaksanakan Penyediaan Makanan dan Minuman rapat bagi Pegawai Dinas dan UPTD serta tamu dinas selama 12 bulan;
- 10) Meningkatnya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pegawai Dinas dan UPTD selama 12 bulan;
- 11) Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran selama 12 bulan;
- 12) Meningkatnya koordinasi dan konsolidasi ke dalam daerah selama 12 bulan;
- 13) Meningkatnya penyediaan layanan administrasi perkantoran untuk UPT Balai Latihan Perkeroperasian dan UMKM selama 12 bulan.

## 2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana**

Sasaran :

- 1) Melaksanakan Perlengkapan Gedung Kantor sebanyak 1 (satu) Paket;
- 2) Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional selama 12 bulan;
- 3) Meningkatnya Pemeliharaan rutin/ berkala Peralatan Gedung Kantor selama 12 bulan.

## 3. **Program Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Sasaran :

- 1) Meningkatnya disiplin aparatur pegawai melalui pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 86 orang.

#### **4. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif**

Sasaran :

1. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan

Output dari kegiatan ini adalah didapatnya data bidang koperasi dan UMKM yang akurat, baik dan benar serta data perkembangannya yang dilaksanakan selama 12 bulan.

#### **5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**

Sasaran :

1. Penilaian & Penghargaan bagi UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi

Output dari kegiatan Penilaian & Penghargaan bagi UMKM Berprestasi adalah terpilihnya 5 pelaku usaha mikro terbaik dan 5 pelaku usaha kecil terbaik tingkat provinsi;

2. Kegiatan Temu Mitra dengan Rumah Kemas dan Lembaga Pembiayaan

Output dari Kegiatan Temu Mitra dengan Rumah Kemas dan Lembaga pembiayaan adalah mempertemukan 50 UMKM dari Kab/Kota dengan klinik kemas guna membuka wawasan dan membangun jaringan kerjasama antara UMKM tersebut dengan klinik kemas dalam hal desain kemas produk;

3. Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan

Output dari kegiatan Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan adalah tersedianya 4 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan untuk wilayah penugasan Kabupaten Bangka, Bangka Selatan dan Kota Pangkalpinang dengan target pembinaan/penyuluhan sebanyak 100 koperasi;

#### **6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil dan menengah**

Sasaran :

1. Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Output dari kegiatan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan adalah meningkatnya/bertambahnya pengetahuan pelaku usaha dan aparatur pembina Koperasi dan UMKM mengenai bantuan dan program permodalan dari bank, instansi BUMN dan lembaga keuangan lainnya dengan realisasi 148 pelaku usaha dan 32 aparatur pembina koperasi dan UMKM dari Kab Bangka, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang;

2. Promosi Kerajinan Khas Daerah melalui Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ)

Output dari kegiatan Promosi Kerajinan Khas Daerah melalui Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) adalah adanya peningkatan penjualan produk kerajinan khas daerah yang diikuti oleh 20 pelaku usaha perwakilan Kabupaten/Kota se Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung selama 40 hari bertempat di JICC Jakarta;

3. Koordinasi pemanfaatan fasilitasi pemerintah untuk UKM dan Koperasi (rapat forum koordinasi pemberdayaan KUKM)

Output dari pelaksanaan kegiatan koordinasi pemanfaatan fasilitasi pemerintah untuk UKM dan Koperasi (rapat forum koordinasi pemberdayaan KUKM) adalah terselenggaranya 2 (dua) kali rapat koordinasi pemberdayaan KUKM dengan melibatkan instansi terkait, BUMN, perbankan, perguruan tinggi dan pelaku usaha;

4. Promosi kerajinan khas daerah melalui pameran INA CRAFT

Output dari pelaksanaan kegiatan promosi kerajinan khas daerah melalui pameran INA CRAFT adalah meningkatkan hasil penjualan produk unggulan daerah (6 pelaku usaha) dan lebih memperkenalkan produk unggulan daerah tersebut ke tingkat nasional;

5. Promosi produk UMKM melalui pameran di Belitung

Output dari pelaksanaan kegiatan promosi produk UMKM melalui pameran di Belitung adalah ikut berpartisipasi aktif terhadap kegiatan promosi produk unggulan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Belitung melalui Belitung Fair dengan mengikutsertakan 4 pelaku usaha asal pulau Bangka selama 6 hari di Tanjung Pandan Belitung;

## 7. **Program peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**

Sasaran :

1. Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Output pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi adalah pemeringkatan sebanyak 42 koperasi berprestasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan menyeleksi koperasi berprestasi tersebut untuk diusulkan sebagai koperasi berprestasi ke Kementerian Koperasi dan UKM RI. Pada tahun 2016 ini Kopdit Kabari Pangkalpinang terpilih sebagai salah satu koperasi berprestasi dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi

Output dari pelaksanaan kegiatan model-model pola pengembangan koperasi adalah meningkatnya pemahaman pengurus koperasi mengenai model-model pola pengembangan koperasi dengan mengadakan studi komparasi sebanyak 35 pengurus koperasi ke BMT Bima Magelang Jawa Tengah;

3. Bimbingan teknis pelaksanaan RAT (rasionalisasi fungsi kelembagaan koperasi)

Output dari pelaksanaan kegiatan bimbingan pelaksanaan RAT (rasionalisasi

fungsi kelembagaan koperasi) adalah meningkatnya pemahaman dan pelaksanaan RAT koperasi di Kab. Bangka, Bangka Selatan, Bangka Barat dan Belitung Timur dengan total peserta 80 orang pengurus koperasi;

4. **Penilaian Tokoh Koperasi & Penghargaan Koperasi Berprestasi**

Output dari pelaksanaan kegiatan Penilaian Tokoh Koperasi & Penghargaan Koperasi Berprestasi adalah menjangkau dan mengevaluasi usulan kabupaten/kota mengenai tokoh penggerak koperasi untuk diusulkan sebagai tokoh penggerak koperasi ke Kementerian Koperasi dan UKM RI. Pada tahun 2016 telah terpilih sebagai tokoh penggerak koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu: Bupati Belitung, Datuk Ramli Sutanegara, Sukijo dan Kepala Dinas Perindagkop Kabupaten Belitung;

5. **Sosialisasi guna mendorong tumbuhnya koperasi dari lembaga keuangan mikro**

Output dari pelaksanaan kegiatan guna mendorong tumbuhnya koperasi dari lembaga keuangan mikro adalah terlaksananya sosialisasi kepada 120 LKM di Kab. Bangka, Bangka Tengah, Bangka Barat, Bangka Selatan, Belitung dan Belitung Timur, dengan hasil penumbuhan koperasi baru berjumlah 19 koperasi pada tahun 2016;

6. **Rakor penguatan kelembagaan koperasi tingkat kab/kota**

Output dari pelaksanaan kegiatan Rakor penguatan kelembagaan koperasi tingkat kab/kota adalah meningkatnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penguatan kelembagaan koperasi dengan peserta dari aparatur Pembina koperasi yang berasal dari 7 kab/kota dan aparatur Pembina koperasi di provinsi.

8. **Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Sasaran :

1. **Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM di Prov. Kep. Bangka Belitung**

Output dari pelaksanaan kegiatan Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM di Prov. Kep. Bangka Belitung adalah terlatihnya 25 orang yang berasal dari pelajar, mahasiswa dan pelaku usaha mengenai studi kelayakan suatu usaha;

2. **Pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam**

Output dari pelaksanaan pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam adalah terlatihnya 25 orang pengurus koperasi dalam hal pengelolaan koperasi simpan pinjam bagi pengurus koperasi simpan pinjam perwakilan dari kab/kota;

3. **Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi**

Output dari pelaksanaan Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi adalah terlatihnya 25 juru buku koperasi perwakilan dari kab/kota;

4. Pelatihan Kewirausahaan dan AMT bagi Koperasi dan UMKM

Output dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan AMT bagi Koperasi dan UMKM adalah terlatihnya 50 orang KUMKM di bidang AMT perwakilan dari kab/kota (2 angkatan);

5. Diklat Perkoperasian bagi Koperasi Sektor Pertanian/ Perkebunan di Prov. Kep. Babel

Output dari pelaksanaan kegiatan Diklat Perkoperasian bagi Koperasi Sektor Pertanian/ Perkebunan di Prov. Kep. Babel adalah terlatihnya 25 pengurus koperasi sektor pertanian/ perkebunan perwakilan kabupaten dalam pengelolaan keuangan koperasi;

6. Pelatihan dan Pendampingan Inovasi/ Ide Desain Kemasan Produk bagi UMKM

Output dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan dan Pendampingan Inovasi/ Ide Desain Kemasan Produk bagi UMKM adalah terlatihnya 25 orang UMKM di bidang inovasi/ide desain kemasan produk;

7. Pelatihan Pengawasan Koperasi

Output dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengawasan Koperasi adalah terlatihnya 25 orang pengawas koperasi perwakilan kab/kota di bidang pengawasan koperasi;

8. Pelatihan Perpajakan Koperasi (DAK)

Output dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Perpajakan Koperasi (DAK) adalah terlatihnya 30 pengurus koperasi dari kab Belitung dan 30 pengurus koperasi dari kab Belitung Timur dan dilanjutkan dengan pendampingan selama 6 bulan;

9. Pelatihan Akuntansi Koperasi (DAK)

Output dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Akuntansi Koperasi (DAK) adalah terlatihnya 30 juru buku dan pengelola keuangan koperasi di kab bangka barat dan kab bangka selatan dibidang akuntansi koperasi dilanjutkan dengan pendampingan selama 6 bulan;

10. Pelatihan Business Plan (DAK)

Output dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Business Plan (DAK) adalah terlatihnya 80 UMKM dari Kab Bangka Tengah dan Bangka Selatan di bidang business plan dilanjutkan dengan pendampingan selama 6 bulan;

11. Pelatihan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (DAK)

Output dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (DAK) adalah terlatihnya 30 pengurus koperasi untuk menerapkan pola syariah pada koperasi simpan pinjam di Kab Bangka Tengah dilanjutkan

dengan pendampingan selama 6 bulan;

12. Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Kemasan/Desain Produk (Packaging) (DAK)

Output dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Kemasan/Desain Produk (Packaging) (DAK) adalah terlatihnya 60 UMKM Kab Bangka dan Bangka Selatan di bidang manajemen kemasan/Desain Produk (Packaging) dilanjutkan dengan pendampingan selama 6 bulan;

13. Pelatihan Manajemen Keuangan (DAK)

Output dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan (DAK) adalah terlatihnya 120 UMKM di bidang manajemen keuangan dari kota Pangkalpinang, kab Bangka dan Bangka Barat dilanjutkan dengan pendampingan selama 6 bulan;

14. Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Berbasis Teknologi Pemasaran (DAK)

Output dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Berbasis Teknologi Pemasaran (DAK) adalah terlatihnya 120 UMKM di bidang Manajemen berbasis teknologi dari kota Pangkalpinang, kab Bangka dan Bangka Barat dilanjutkan dengan pendampingan selama 6 bulan;

15. Pelatihan Pengawasan Koperasi (DAK)

Output dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Pengawasan Koperasi (DAK) adalah terlatihnya 38 pengawas koperasi dari Kab Belitung dan Belitung Timur di bidang pengawasan koperasi dilanjutkan dengan pendampingan selama 6 bulan;

## 9. **Program Pengembangan Koperasi dan UKM Berbasis Potensi Lokal**

Sasaran

1. Sebelumnya Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha UKM berubah menjadi Pendampingan Pembentukan Badan Usaha UKM

Output dari pelaksanaan kegiatan Sebelumnya Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha UKM berubah menjadi Pendampingan Pembentukan Badan Usaha UKM adalah terbitnya 25 P-IRT untuk 25 UMKM di kabupaten Belitung;

2. Sebelumnya Fasilitasi Sertifikat Halal berubah menjadi sertifikat halal

Output dari pelaksanaan kegiatan Sebelumnya Fasilitasi Sertifikat Halal berubah menjadi sertifikat halal adalah terbitnya 35 sertifikat halal dari MUI Babel untuk 35 UMKM di 7 kab/kota (5 UMKM per Kab/Kota).

## 10. **Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah**

Sasaran :

1. Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Output dari pelaksanaan Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah adalah tersusunya 1 (satu) draf raperda tentang perlindungan usaha kecil menengah.

## ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya yang digunakan dalam menganalisa efisiensi capaian kinerja dibatasi dari anggaran kegiatan saja. Dalam menganalisa efisiensi penggunaan sumber daya digunakan persamaan sebagai berikut:

$$E/I = ((\text{Anggaran Kegiatan} / \text{Target Kinerja}) \times \text{Realisasi Kinerja}) - \text{Realisasi anggaran}$$

### Keterangan:

E/I = Efisiensi atau inefisiensi

Kategori efisien atau inefisiensi bukan batasan adanya kerugian Negara atas pemakaian/penggunaan sumber daya keuangan, namun sebagai bahan pertimbangan dalam pemakaian/penggunaan anggaran belanja atas *output* atau *outcome* yang dihasilkan.

#### a. Persentase Pertumbuhan Koperasi Aktif

Pertumbuhan Koperasi Aktif menggunakan anggaran kegiatan Pembuatan Akta Notaris untuk Koperasi sebesar Rp. 136.475.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 78.269.800 atau 57%.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian indeks reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} E/I &= ((\text{Rp.136.475.000,00} / 35) \times 22) - 78.269.800 \\ &= \text{Rp. 7.514.486} \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Pertumbuhan Koperasi Aktif dapat dikatakan efisiensi sebesar Rp 7.514.486 Dengan hasil ini dapat dijadikan acuan dan koreksi untuk lebih baik di tahun selanjutnya.

#### b. Persentase pertumbuhan KUKM

Capaian kinerja dari indikator Persentase pertumbuhan KUKM, pada tahun anggaran 2017 didukung oleh anggaran kegiatan pemberdayaan petugas penyuluh koperasi Lapangan (PPKL) dengan anggaran sebesar Rp 108.950.000,00 dan realisasi sebesar Rp108.669.900,00

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase pertumbuhan KUKM pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} E/I &= ((Rp. 108.950.000/ 4) \times 4) - Rp. Rp108.669.900,00 \\ &= Rp. 280.100 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase pertumbuhan KUKM di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikatakan efisien sebesar Rp. 280.100 Adanya efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan agar hasil capaian Persentase SDM KUKM yang berkualitas dipertahankan atau lebih ditingkatkan.

### **C. Persentase Pertumbuhan UMKM dan Pengembangan UMKM yang berkualitas**

Capaian kinerja dari indikator Persentase Pertumbuhan Pengembangan UMKM yang berkualitas di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun anggaran 2017 didukung oleh anggaran kegiatan sebesar Rp. 1.979.703.600,00 dan realisasi sebesar Rp. 1.906.501.631,00 yang terdiri dari **7 (tujuh)** kegiatan yaitu:

- Kegiatan Sosialisasi Dukungan Penyediaan Permodalan dengan anggaran sebesar Rp 197.473.100,00 dan realisasi sebesar Rp. 189.124.600,00; atau dengan Persentase 95,77 %
- Kegiatan Pengembangan Promosi Produk Unggulan Melalui Media Online dengan anggaran sebesar Rp. 24.862.500,00 dan realisasi sebesar Rp. 21.162.500,00 atau dengan Persentase 85,12 %.
- Kegiatan Promosi Produk Unggulan Daerah Melalui Pameran Produk Kreatif dan Inovasi Unggulan Daerah (PPUD Expo) dengan anggaran sebesar Rp. 559.888.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 542.099.800,00 atau dengan Persentase 96,82 %.
- Kegiatan Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal dengan anggaran sebesar Rp. 857.300,000,00 dan realisasi sebesar Rp. 823.518.231,00 atau dengan Persentase 96,06 %
- Kegiatan Explore Bangka Belitung dengan anggaran sebesar Rp. 306.130.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 299.821.500,00 atau dengan Persentase 97,94 % .
- Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Mobile Platform Pemasaran Produk UMKM dengan

anggaran sebesar Rp. 34.050.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 30.775.000,00 atau dengan Persentase 90,38 %.

Efisiensi penggunaan sumber daya untuk capaian Persentase SDM KUKM yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} E/I &= ((Rp\ 1.979.703.600,00 / 359 ) \times 500 ) - Rp\ 1.906.501.631,00 \\ &= Rp.850.745.723,00 \end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Persentase SDM KUKM yang berkualitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dikatakan efisiensinya sebesar Rp.850.745.723,00 atau dengan Persentase 43 %. Adanya efisiensi penggunaan sumber daya tersebut diharapkan agar hasil capaian Persentase Pertumbuhan dan Pengembangan UMKM dapat dipertahankan atau lebih ditingkatkan.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA SASARAN TAHUN 2017

Ada 3 (tiga) Indikator pencapaian sasaran ditargetkan pada Tahun 2017, yaitu sebagaimana tabel dibawah ini.

**Tabel 3.1. Pengukuran Kinerja Sasaran**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET DAN REALISASI TAHUN 2017		
			Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya pertumbuhan Koperasi	Persentase Pertumbuhan koperasi baru	35 Koperasi	22 koperasi	15,5%
2	Meningkatnya pertumbuhan KUMKM	Persentase KUKM yang diberdayakan	359	500	1,4 %
3	Meningkatnya kualitas SDM KUKM	Meningkatnya Kualitas SDM KUKM	490 org	490 org	100 %

Dari tabel di atas, dengan analisis sederhana berdasarkan pembagian terhadap persentase capaian masing-masing indikator kinerja dengan asumsi :

- a. Dinilai tidak berhasil jika capaian indikator pada range 0-25%
- b. Kurang berhasil jika capaian indikator pada range 26-60%
- c. Cukup berhasil jika jika capaian indikator pada range 61-90%, dan
- d. Berhasil jika jika capaian indikator pada range 91-100%

diperoleh gambaran bahwa dari 8 (delapan) indikator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017, terdapat 4(empat) indikator yang capaiannya dalam kategori berhasil dengan persentase capaian lebih dari 100%, 1 (satu) indikator masih dalam kategori kurang berhasil dan 3 (tiga) indikator yaitu pertumbuhan koperasi aktif, pertumbuhan UKM dan peningkatan jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah terkesan dibawah nol (minus) tapi kondisi sebenarnya bukan tidak adanya pertumbuhan tapi karena adanya perubahan basis data (existing) tentang data UKM yang ada di kabupaten/kota sehingga hasil yang dicapai tidak bisa dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk

pertumbuhan koperasi aktif tidak bisa dihitung karena jumlah koperasi yang tumbuh (19 koperasi) lebih kecil bila dibandingkan dengan koperasi yang tidak aktif (40 koperasi).

### **3.2 PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA KEGIATAN TAHUN 2017**

Ada 9 (sembilan) program dan 38 (tiga puluh delapan) kegiatan pada tahun 2017, rata-rata pencapaian secara fisik mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan (data dapat dilihat pada lampiran). Rata-rata pencapaian indikator kegiatan kurang lebih 99,95%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah baik. Secara keseluruhan, target dan capaian indikator kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

#### **1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp2.363.820.000,00 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp2.319.495.000,00 (mengalami penurunan/rasionalisasi sebesar Rp 44.325.000,00) dengan 13 (tigabelas) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp 2.175.976.560,00 atau 93,81% dengan sisa anggaran sebesar Rp 143.518.440,00 atau 6,19%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

##### **1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan jasa surat masuk dan surat keluar kantor selama 1 tahun.

##### **2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik**

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya jasa komunikasi dan Listrik perkantoran selama 1 tahun.

##### **3. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan**

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pelaksanaan administrasi keuangan kegiatan perkantoran selama 1 tahun.

##### **4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor**

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan kebersihan dan terlaksananya kebersihan lingkungan kantor dan lingkungan kerja serta terjaganya kondisi keamanan kantor.

##### **5. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor**

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya alat tulis kantor untuk kegiatan dan rutin kantor selama 1 (satu) tahun.

##### **6. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan**

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya blanko, kop surat, amplop dan bahan cetakan/ perbanyak naskah kantor selama 1 tahun.

7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  
Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor selama 1 tahun.
8. Kegiatan Penyediaan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan  
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya bahan bacaan seperti surat kabar, dan buku-buku perundang-undangan sebagai sarana pengembangan wawasan dan sumber informasi selama 1 tahun.
9. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman  
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya makan minum untuk tamu dan rapat-rapat kantor selama 1 tahun.
10. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah  
Output kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi, konsultasi, sosialisasi dan pendidikan pegawai ke luar daerah selama 1 tahun.
11. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang dan Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran  
Output kegiatan ini adalah tersedianya jasa penunjang dan pengelolaan pelayanan administrasi perkantoran selama 1 tahun.
12. Kegiatan koordinasi dan konsolidasi ke dalam daerah  
Output kegiatan ini adalah terlaksananya perjalanan dinas dalam rangka koordinasi dan konsolidasi pegawai ke dalam daerah selama 1 tahun.
13. Kegiatan Sebelumnya Operasional UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM berubah menjadi Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM  
Output kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan layanan administrasi perkantoran untuk UPT Balai Latihan Perkoperasian dan UMKM selama 1 tahun.

## **2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**

Jumlah dana yang dialokasikan untuk Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada APBD Induk Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp725.580.000,00 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp525.580.000,00 (mengalami pengurangan/rasionalisasi sebesar Rp 200.000.000,00) dengan 3 (tiga) kegiatan. Realisasi serapan anggaran sebesar Rp 454.673.950,00 atau 86,51% dengan sisa anggaran sebesar Rp70.906.050,00 atau 13,49% dan realisasi fisik 99,99%.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

1. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor  
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya perlengkapan gedung kantor dinas dan PLUT KUMKM, yang tidak terealisasi adalah pengadaan instalasi telepon karena pagu dana tidak mencukupi;

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan bahan bakar dan perbaikan/service, belanja sparepart, aki, ban dan pajak kendaraan untuk 4 unit mobil dan 12 motor dinas untuk menunjang aktivitas kerja selama 1 tahun.

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya biaya service/perbaikan peralatan kantor untuk menunjang aktivitas kerja selama 1 tahun.

3. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

Jumlah Dana yang dialokasikan pada APBD Induk sebesar Rp 65.479.000,00 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp42.000.000,00 (mengalami pengurangan/rasionalisasi sebesar Rp23.479.000,00) dengan realisasi keuangan Rp 42.000.000,00 atau sebesar 100% dan realisasi fisik 100%.

Adapun kegiatann yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengadaan seragam aparaturn sebanyak 86 (delapan puluh enam) stel.

4. **Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**

1. **Pembinaan Perizinan dan Akses Permodalan UMKM**

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp263.644.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp215.451.800,- atau 81,72%. Keluaran kegiatan ini adalah teridentifikasinya kebutuhan perizinan dalam mengakses permodalan UKM di 7 Kab/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan target fasilitasi penerbitan 3500 IUMK.



Foto : Pembinaan Perizinan dan Akses Permodalan di Kabupaten Bangka Barat



Foto : Pembinaan Perizinan dan Akses Permodalan di Kabupaten Bangka Tengah

## 5. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi

1. Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp108.950.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp108.669.900,- atau 99,77%. Keluaran kegiatan ini adalah terlaksananya penyediaan Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) sebanyak 4 (empat) orang penyuluh koperasi lapangan dengan alokasi 1 orang PPKL untuk Kabupaten Bangka, 2 orang PPKL untuk Kota Pangkalpinang dan 1 orang PPKL untuk Kabupaten Bangka Selatan dengan target 100 Koperasi lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



## 6. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM

1. Sosialisasi Dukungan Penyediaan Permodalan Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp197.473.100,- dan realisasi anggaran sebesar Rp189.124.600,- atau 95,77%. Kegiatan dilaksanakan di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan total peserta sebanyak 120 UMKM dan 35 aparatur dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM masing-masing Kabupaten/Kota. Keluaran dari kegiatan ini adalah terbiayainya sosialisasi kepada KUMKM dan instansi yang membina KUMKM tentang akses permodalan baik yang disediakan oleh perbankan maupun lembaga non perbankan.



2. Kegiatan Pengembangan Promosi Produk Unggulan Melalui Media Online

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.862.500,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp21.162.500,- atau 85,12%. Keluaran kegiatan ini adalah terpublikasinya produk UKM melalui media online sebanyak 30 produk.



3. Promosi Produk Unggulan Khas Daerah melalui Pameran Produk Kreatif dan Inovasi Unggulan Daerah (PPUD Expo)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp559.888.000,-. Kegiatan dilaksanakan selama lebih kurang 40 hari dengan peserta sebanyak 20 UMKM sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp542.099.800,- atau 96,82%. UMKM-UMKM yang dipilih mengikuti event ini adalah UMKM yang diseleksi dari 7 Kabupaten/Kota. Keluaran kegiatan adalah dikenal dan terjualnya kerajinan khas daerah seperti makanan khas, cual, mote dan rajutan milik 20 UMKM pada Pekan Raya Jakarta.

	
<p>Foto : Stand Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Event PRJ</p>	<p>Foto : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung mengunjungi Stand Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>

4. Diseminasi dan Fasilitasi Sertifikat Halal Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp857.300.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp823.518.231,- atau 96,06%. Kegiatan dilaksanakan di 7 Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan target sebanyak 150 Pelaku Usaha Kecil dan menerbitkan 150 lembar Sertifikat Halal bagi UMKM di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan keluaran kegiatan adalah terfasilitasinya penerbitan pengakuan jaminan mutu/kualitas produk UMKM dengan sertifikat halal sebanyak 150 sertifikat.

	
<p>Foto : Penyerahan Sertifikat Halal di Kabupaten Bangka Barat</p>	<p>Foto : Salah satu UMKM peserta pada Kegiatan Sertifikat Halal</p>

5. Kegiatan Explore Bangka Belitung

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp306.130.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp299.821.500,- atau 97,94%. Kegiatan dilaksanakan di Yogyakarta dengan mengikutsertakan sebanyak 10 UMKM se Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan keluaran kegiatan adalah terlaksananya promosi kuliner, makanan khas dan produk unggulan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



#### 6. Kegiatan Sosialisasi Aplikasi Mobile Platform Pemasaran Produk UMKM

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp34.050.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp30.775.000,- atau 90,38%. Kegiatan dilaksanakan di Kota Pangkalpinang dengan target sebanyak 100 UMKM. Keluaran kegiatan adalah terlaksananya Sosialisasi Aplikasi Mobile Platform dan tersedianya Informasi Pemasaran Produk Usaha Kecil melalui media Aplikasi Mobile Platform (konten lalaper) pada aplikasi “bantuku” pada play store.



### 7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

1. Kegiatan Diklat Perpajakan Koperasi (DAK) Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp314.012.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp268.007.000,- atau 85,35%. Kegiatan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) angkatan dengan peserta sebanyak 90 orang pengurus koperasi dari Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan dan Kabupaten Bangka Barat. Pelatihan Perpajakan Koperasi angkatan I dan angkatan II

(peserta berasal dari Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Selatan) dilaksanakan di Gedung BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan untuk angkatan III (peserta berasal dari Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat) dilaksanakan di Gedung UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keluaran kegiatan adalah terlatihnya 90 orang pengurus koperasi yang memahami tentang Perpajakan Koperasi yang dilaksanakan selama 5 hari (40 jpl) dan diikuti dengan pendampingan selama 6 (enam) bulan pasca pelatihan oleh tenaga pendamping.

	
<p>Foto Pembukaan Pelatihan Perpajakan Angkatan I</p>	<p>Foto Narasumber pada Pelatihan Perpajakan Angkatan III</p>

## 2. Kegiatan Pelatihan Business Plan (DAK)

Kegiatan ini dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 269.968.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 261.622.450,- atau 96,91%. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 2 angkatan dengan peserta sebanyak 80 UMKM yang berasal dari Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka dan Kabupaten Bangka Barat). Pelatihan ini dilaksanakan di Gedung Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 hari (40 jpl) dan diikuti dengan pendampingan selama 6 bulan oleh tenaga pendamping. Keluaran kegiatan adalah terlatihnya 80 UMKM di bidang Business Plan.

	
<p>Narasumber sedang Membimbing Peserta Menyusun Business Plan</p>	<p>Pembukaan sekaligus Pengarahan Kepala Dinas Koperasi</p>

3. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Kemasan/Desain Produk (Packaging) (DAK)

Kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp123.614.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp120.614.000,- atau 97,57%. Pelatihan dilaksanakan 1 angkatan dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang pelaku usaha yang berasal dari Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Barat bertempat di Gedung Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelatihan dilaksanakan selama 5 (lima) hari (40 jpl) dan diikuti dengan pendampingan selama 6 bulan oleh tenaga pendamping. Keluaran dari kegiatan ini adalah terlatihnya 30 pelaku usaha dalam mendesain kemasan (packaging) produk yang mereka hasilkan.



4. Kegiatan Pelatihan Manajemen Keuangan (DAK)

Kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 504.256.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 490.928.750,- atau 97,36%. Pelatihan Manajemen Keuangan dilaksanakan sebanyak 4 angkatan (120 UMKM) dengan peserta berasal dari Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Pelatihan ini dilaksanakan Gedung Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 hari (40 jpl) dan diikuti dengan pendampingan selama 6 bulan oleh tenaga pendamping. Keluarannya adalah terlatihnya 120 UMKM di bidang Manajemen Keuangan.

	
<p>Suasana Kelas Pelatihan Manajemen Keuangan</p>	<p>Interaksi antar peserta pada Pelatihan Manajemen Keuangan</p>

5. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Berbasis Teknologi Pemasaran (DAK)

Kegiatan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 244.828.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 237.982.000,- atau 97,20%. Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Berbasis Teknologi Pemasaran dilaksanakan sebanyak 2 angkatan (60 UMKM) dengan peserta berasal dari Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka Selatan). Pelatihan ini dilaksanakan Gedung Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 hari (40 jpl) dan diikuti dengan pendampingan selama 6 bulan oleh tenaga pendamping . Keluarannya adalah terlatihnya 60 UMKM di Bidang Manajemen Berbasis Teknologi Pemasaran.

	
<p>Narasumber pada Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Berbasis Teknologi Pemasaran</p>	<p>Suasana Pembelajaran pada Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Berbasis Teknologi Pemasaran</p>

6. Kegiatan Pelatihan Pengawasan Koperasi (DAK)

Kegiatan Pelatihan Pengawasan Koperasi dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 122.742.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 120.311.600,- atau 98,02%. Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 1 angkatan (30 Pengawas/Pengurus) koperasi yang berasal dari Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Bangka).

Pelatihan ini dilaksanakan Gedung Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 hari (40 jpl) dan diikuti dengan pendampingan selama 6 bulan oleh tenaga pendamping . Keluarannya adalah terlatihnya 30 orang pengawas/pengurus koperasi di Bidang pengawasan koperasi.



#### 7. Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015

Kegiatan Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015 dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 211.341.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 195.311.300,- atau 92,42%. Kegiatan ini peruntukkan bagi aparatur UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 21 orang. Melalui kegiatan ini aparatur UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibimbing untuk mampu menyusun dan menerapkan SOP serta mampu membentuk Tim Auditor Internal yang kesemuanya ini bertujuan untuk memudahkan integrasi dengan sistem manajemen lainnya, menyediakan pendekatan yang integrative terhadap konsep manajemen organisasi, menyediakan fondasi yang konsisten untuk masa yang akan datang, mencerminkan kompleksitas dari lingkungan dimana organisasi beroperasi saat ini, memastikan standar internasional ini memenuhi kebutuhan seluruh bidang organisasi yang hendak mengadopsinya serta meningkatkan kemampuan organisasi dalam upaya memuaskan pelanggan.

Keluaran dari kegiatan ini adalah terlatihnya 21 orang aparatur UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam persiapan menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 : 2015.



8. Rapat Koordinasi Monitoring dan evaluasi Pasca Pelatihan (DAK)

Kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan evaluasi Pasca Pelatihan dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 152.612.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 149.655.700,- atau 98,06%. Kegiatan ini merupakan evaluasi atas kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh tenaga pendamping terhadap peserta pelatihan yang telah dilatih sebelumnya dalam menerapkan materi pelatihan. Keluaran dari kegiatan ini adalah dievaluasinya kinerja 30 pendamping pasca pelatihan dan adanya feed back kendala yang dihadapi dalam menerapkan hasil pelatihan.



9. Pelatihan Achievement Motivation Training (DAK)

Kegiatan Pelatihan Achievement Motivation Training dilaksanakan oleh UPTD Balai Pelatihan Perkoperasian dan UMKM Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp 267.968.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp 266.207.900,- atau 99,34%. Pelatihan ini dilaksanakan sebanyak 2 angkatan (40 UMKM) yang berasal dari Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka). Pelatihan ini

dilaksanakan Gedung BKPSDMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 5 hari (40 jpl) dan diikuti dengan pendampingan selama 6 bulan oleh tenaga pendamping. Keluarannya adalah membentuk karakter berwirausaha terhadap 40 pelaku usaha dari wilayah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka.



## 8. Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah.

### 1. Bimtek Pelaksanaan RAT (Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi)

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp177.160.000,- dan realisasi anggaran sebesar Rp109.920.400,- atau 93,82%. Kegiatan dilaksanakan selama masing-masing 1 hari di 7 Kabupaten/Kota dengan sasaran sebanyak 140 Koperasi.



### 2. Kegiatan Pembuatan Akta Notaris untuk Koperasi

Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan alokasi anggaran sebesar Rp136.475.000,- atau 56,98%. Kegiatan dilaksanakan di 7 Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan target sebanyak 35 Koperasi dan menerbitkan 35 lembar Akta Notaris untuk Koperasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sedangkan keluaran kegiatan adalah terbentuknya Koperasi yang berbadan hukum.



➤ Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan

1. Pelaksanaan beberapa program dan kegiatan pada Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 tidak optimal dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran. Hal tersebut menyebabkan output kegiatan juga harus disesuaikan kembali dengan ketersediaan anggaran.
2. Selain penyesuaian output kegiatan, beberapa kegiatan ada yang dihapus terkait rasionalisasi anggaran.

- Solusi

1. Agar pada saat pengusulan anggaran dan kegiatan tahun berikutnya disesuaikan dengan ketersediaan dana dengan memprioritaskan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung ke masyarakat.
2. Dengan kondisi anggaran pemerintah yang terbatas, jika memungkinkan untuk dapat mengajukan kerjasama pendanaan dengan BUMN terkait pengembangan KUKM.

### 3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Dalam Tahun Anggaran 2017 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah melaksanakan program sebanyak 9 (sembilan) program dengan 40 (empat puluh) kegiatan dengan total alokasi anggaran belanja langsung pada APBD induk sebesar Rp Rp13.480.938.211,86 dan pada APBD Perubahan menjadi Rp13.773.923.464,00 (mengalami penambahan/kenaikan sebesar Rp. 292.985.252,14) dengan penambahan kegiatan sebanyak 3 (tiga) kegiatan dan rasionalisasi sebanyak 2 kegiatan. Realisasi serapan anggaran belanja langsung sebesar Rp Rp13.199.835.292,00 atau 95,02% dengan sisa anggaran sebesar Rp.574.088.172,00 atau 4,98%. Alokasi belanja tidak langsung pada APBD induk sebesar Rp5.837.517.611,86 dan pada APBD perubahan menjadi Rp5.748.138.864,00 (mengalami Penurunan sebesar Rp89.378.747,86) dengan

realisasi sebesar Rp 5.405.555.003,00 atau 94,04% dengan sisa anggaran Rp342.583.861,00 atau 5,96%. Untuk pendapatan asli daerah, target anggaran untuk tahun 2017 sebesar Rp117.300.000,00 dan terealisasi sebesar Rp133.375.000,00 atau 113,70%.

Rincian realisasi pendapatan dan belanja keseluruhan adalah sebagai berikut :

**a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017**

**Realisasi Pendapatan Daerah  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD Induk	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI PENDAPATAN	
					KEUANGAN (Rp)	%
I.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	0,00	117.300.000,00	100,00	133.375.000,00	113,70
1	Retribusi Daerah	0,00	117.300.000,00	100,00	133.375.000,00	113,70

**b. Realisasi Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017**

**Realisasi Belanja Tidak Langsung  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD Induk	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI ANGGARAN		SISA ANGGARAN	
					KEUANGAN (Rp)	%	KEUANGAN (Rp)	%
I.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.568.397.957,00	5.775.522.957,00	100,00	5.499.245.852,00	95,22	276.277.105,00	4,78
A	GAJI DAN TUNJANGAN	2.832.370.797,00	2.832.370.797,00	100,00	2.771.728.352,00	97,86	60.642.445	2,13
B	TAMBAHAN PENGHASILAN PNS	2.736.027.160,00	2.943.152.160,00	100,00	2.727.517.500,00	92,67	215.634.660,00	7,33

c. Realisasi Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017

**Realisasi Belanja Langsung  
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Tahun Anggaran 2017**

NO	URAIAN KEGIATAN	APBD Induk	APBD Perubahan (Rp)	FISIK (%)	REALISASI		SISA ANGGAR
					KEUANGAN (Rp)	%	(Rp)
II.	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	7.973.973.000,00	8.401.622.894,00	100,00	7.839.983.893,00	93,32	561.639.001,00
A	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>2.363.820.000,00</b>	<b>2.319.495.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.175.976.560,00</b>	<b>93,81</b>	<b>143.518.440,00</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	19.086.420,00	76,35	5.913.580,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	185.400.000,00	85.095.000,00	100,00	79.476.300,00	93,40	5.618.700,00
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	115.170.000,00	160.230.000,00	100,00	160.140.000,00	99,94	90.000,00
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	20.000.000,00	30.000.000,00	100,00	29.988.500,00	99,96	11.5000
5	Penyediaan alat tulis kantor	100.000.000,00	115.920.000,00	100,00	115.918.250,00	99,99	1.750,00
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100.000.000,00	85.000.000,00	100,00	69.543.000,00	81,82	15.457.000,00
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	22.885.000,00	76,28	7.115.000,00
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	100,00	0
9	Penyediaan makanan dan minuman	35.000.000,00	35.000.000,00	100,00	32.916.600,00	94,05	2.083.400,00
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	298.420.000,00	298.420.000,00	100,00	298.417.790,00	99,99	2.210,00
11	Penyediaan Jasa Penunjang Pengelolaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.029.690.000,00	1.029.690.000,00	100,00	1.029.600.000,00	99,99	90.000,00
12	Koordinasi, konsolidasi ke dalam Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	49.961.400,00	99,92	38.600,00
13	Sebelumnya Operasional UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM berubah menjadi	360.140.000,00	360.140.000,00	100,00	253.043.300,00	70,26	107.096.700,00

	Peningkatan Fungsi Pelayanan UPT Balai Pelatihan Koperasi dan UMKM							
<b>B</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>725.580.000,00</b>	<b>525.580.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>454.673.950,00</b>	<b>86,51</b>	<b>70.906.050,00</b>	<b>13,49</b>
14	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	461.700.000,00	261.700.000,00	100,00	245.562.000,00	93,83	16.138.000,00	6,17
15	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	243.880.000,00	243.880.000,00	100,00	189.166.950,00	77,57	54.713.050,00	22,43
16	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor.	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	19.945.000,00	99,73	55.000,00	0,28
<b>C</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>65.479.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Pengadaan Pakaian Dinas/Pakaian Kerja/Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu	42.000.000 ,00	42.000.000,00	100,00	42.000.000,00	100,00	0	0
<b>D</b>	<b>Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif</b>	<b>433.788.000,00</b>	<b>144.800.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>140.016.000,00</b>	<b>96,70</b>	<b>4.784.000,00</b>	<b>3,30</b>
18	Monitoring, Evaluasi & Pelaporan	144.800.000,00	144.800.000,00	100,00	140.016.000,00	96,70	4.784.000,00	3,30
<b>E</b>	<b>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM</b>	<b>524.443.000,00</b>	<b>431.754.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>337.020.750,00</b>	<b>78,06</b>	<b>94.733.250,00</b>	<b>21,94</b>
19	Penilaian dan Penghargaan bagi UMKM Berprestasi Tingkat Provinsi	149.810.000,00	179.400.000,00	100,00	177.464.750,00	98,92	1.935.250,00	1,08
20	Sebelumnya Fasilitas Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM berubah menjadi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi UMKM	89.775.000,00	67.860.000,00	100,00	0,00	00,00	67.860.000,00	100,00
21	Kegiatan Temu Mitra dengan Rumah Kemas dan Lembaga Pembiayaan	48.194.000,00	48.194.000,00	100,00	46.800.000,00	97,11	1.394.000,00	2,89
22	Pemberdayaan Petugas Penyuluh Koperasi lapangan	136.300.000,00	136.300.000,00	100,00	112.756.000,00	82,73	23.544.000,00	17,27
<b>F</b>	<b>Program Pengembangan Sistem</b>	<b>1.280.425.200,00</b>	<b>1.089.178.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1.044.377.300,00</b>	<b>95,89</b>	<b>44.800.800,00</b>	<b>5,11</b>

	<b>Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah</b>								
23	Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan	205.994.200,00	102.997.100,00	100,00	81.644.500,00	79,27	21.352.600,00	20,73	
24	Promosi Kerajinan Khas Daerah Melalui Pameran PRJ	580.290.000,00	580.290.000,0	100,00	560.847.350,00	96,65	19.442.650,00	4,45	
25	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk UMKM dan Koperasi (Rapat Forum Koordinasi Pemberdayaan UMKM)	46.048.000,00	46.048.000,00	100,00	42.345.500,00	91,96	3.702.500,00	8,04	
26	Promosi Kerajinan Khas Daerah melalui Pameran INA CRAFT	215.252.000,00	196.252.000,00	100,00	196.192.950,00	99,96	59.050,00	0,04	
27	Kegiatan Promosi Produk UMKM melalui Pameran di Belitung	163.591.000,00	163.591.000,00	100,00	163.347.000,00	99,85	244.000,00	0,15	
<b>G</b>	<b>Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi</b>	<b>1.001.536.600,00</b>	<b>722.802.700,00</b>	<b>100,00</b>	664.609.789,00	91,95	58.192.911,00	<b>8,05</b>	
28	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	74.130.000,00	74.130.000,00	100,00	74.087.000,00	99,94	43.000,00	0,06	
29	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	239.993.000,00	239.993.000,00	100,00	229.811.000,00	95,76	10.182.000,00	4,24	
30	Bimbingan Teknis Pelaksanaan RAT (Revitalisasi Fungsi Kelembagaan Koperasi)	104.376.000,00	104.376.000,00	100,00	92.486.400,00	88,61	11.889.600,00	11,39	
31	Penilaian Tokoh Koperasi & Penghargaan Koperasi Berprestasi	53.260.000,00	53.260.000,00	100,00	48.841.000,00	91,70	4.419.000,00	8,30	
32	Sosialisasi Guna Mendorong Tumbuhnya Koperasi dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM)	315.003.600,00	152.625.700,00	100,00	134.006.000,00	87,78	18.619.700,00	12,22	
33	Rakor Penguatan Kelembagaan Koperasi Tingkat Kab/Kota	148.418.000,00	98.418.000,00	100,00	85.378.389,00	86,75	13.039.611,00	13,25	

H	<b>Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah</b>	<b>926.640.000,00</b>	<b>2.722.640.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.583.203.750,00</b>	<b>94,88</b>	<b>139.436.250,00</b>	<b>5,12</b>
34	Diklat Studi Kelayakan Usaha KUMKM di Prov. Kep. Bangka Belitung	86.898.000,00	86.898.000,00	100,00	81.336.900,00	93,60	5.561.100,00	6,40
35	Pelatihan Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam	94.498.000,00	94.498.000,00	100,00	79.318.000,00	83,94	15.180.000,00	16,06
36	Pelatihan Dasar Akuntansi Koperasi	94.498.000,00	94.498.000,00	100,00	81.626.000,00	86,38	12.872.000,00	13,62
37	Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan dan AMT bagi Koperasi dan UMKM	369.852.000,00	165.852.000,00	100,00	165.145.000,00	99,57	707.000,00	0,43
38	Diklat Perkoperasian bagi Koperasi Sektor Pertanian/Perkebunan di Prov. Kep. Bangka Belitung	94.498.000,00	94.498.000,00	100,00	80.433.000,00	85,12	14.065.000,00	14,88
39	Pelatihan dan Pendampingan Inovasi/Ide Desain Kemasan Produk bagi UMKM	99.498.000,00	99.498.000,00	100,00	86.374.100,00	86,81	13.123.900,00	13,19
40	Pelatihan Pengawasan Koperasi	86.898.000,00	86.898.000,00	100,00	78.959.250,00	90,86	7.938.750,00	9,14
41	Pelatihan Perpajakan Koperasi (DAK)	0,00	224.406.000,00	100,00	211.426.750,00	94,22	12.979.250,00	5,78
42	Pelatihan Akuntansi Koperasi (DAK)	0,00	118.878.000,00	100,00	113.300.500,00	95,31	5.577.500,00	4,69
43	Pelatihan Business Plan (DAK)	0,00	265.656.000,00	100,00	257.952.000,00	97,10	7.704.000,00	2,90
44	Pelatihan Manajemen Koperasi Simpan Pinjam Pola Syariah (DAK)	0,00	116.578.000,00	100,00	111.219.600,00	95,40	5.358.400,00	4,60
45	Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Kemasan/Desain Produk (Packaging) (DAK)	0,00	235.638.000,00	100,00	231.874.000,00	98,40	3.764.000,00	1,60
46	Pelatihan Manajemen Keuangan (DAK)	0,00	451.412.000,00	100,00	434.946.250,00	96,35	16.465.750,00	3,65
47	Pelatihan Kewirausahaan Bidang Manajemen Berbasis Teknologi	0,00	411.559.000,00	100,00	403.144.250,00	97,96	8.414.750,00	2,04

	Pemasaran (DAK)						
48	Pelatihan Pengawasan Koperasi (DAK)	0,00	175.873.000,00	100,00	166.148.150,00	94,47	9.724.850,00
I	<b>Program Pengembangan Koperasi dan UKM Berbasis Potensi Lokal</b>	<b>520.838.000,00</b>	<b>362.949.094,00</b>	<b>100,00</b>	<b>360.539.994,00</b>	<b>99,34</b>	<b>2.409.100,00</b>
49	Sebelumnya Fasilitasi Kemudahan Formalisasi Badan Usaha UKM berubah menjadi Pendampingan Pembentukan Badan Usaha UKM	199.645.000,00	87.484.094,00	100,00	85.284.094,00	97,49	2.200.000,00
50	Sebelumnya Fasilitasi Sertifikat Halal berubah menjadi Sertifikat Halal	275.465.000,00	275.465.000,00	100,00	275.255.900,00	99,92	209.100,00
J	<b>Program Pengembangan Koperasi dan UMKM Sektor Lembaga dan Wilayah</b>	<b>40.424.000,00</b>	<b>40.424.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>37.565.800,00</b>	<b>92,93</b>	<b>2.858.200,00</b>
51	Penyusunan Kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah	40.424.000,00	40.424.000,00	100,00	37.565.800,00	92,93	2.858.200,00
<b>JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>		<b>5.568.397.957,00</b>	<b>5.775.522.957,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5.499.245.852,00</b>	<b>95,22</b>	<b>276.277.105,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA LANGSUNG</b>		<b>7.973.973.800,00</b>	<b>8.401.622.894,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.839.983.893,00</b>	<b>93,32</b>	<b>561.639.001,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>13.542.371.757,00</b>	<b>14.092.145.851,00</b>	<b>-</b>	<b>13.339.229.745,00</b>	<b>94,66</b>	<b>752.916.106,00</b>

### 3.4 ANALISIS KINERJA

#### 3.4.1 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi SKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama tahun 2016 dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Rasionalisasi anggaran yang dilakukan menyebabkan pencapaian target kinerja tidak optimal sebagaimana yang direncanakan sebelumnya.
2. Pada beberapa pelatihan ada beberapa peserta yang hadir tidak sesuai yang dipersyaratkan sehingga tujuan penyelenggaraan kegiatan belum tercapai seutuhnya.
3. Untuk kegiatan yang diusulkan melalui APBD Perubahan waktu pelaksanaan terlalu sempit karena revisi anggaran baru disahkan pada triwulan IV.
4. Untuk target kinerja yang tidak tercapai khususnya yang terkait dengan

bantuan permodalan adalah dikarenakan regulasi penyaluran KUR sehingga KUR 2016 baru disalurkan pada semester 2017.

Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut diatas, dirumuskan beberapa solusi yang bisa diterapkan antara lain :

1. Untuk tahun anggaran berikutnya agar rasionalisasi anggaran/kegiatan dipertimbangkan secara matang agar pencapaian target kinerja bisa lebih optimal.
2. Untuk usulan peserta pelatihan sebaiknya sudah diterima 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan agar Panitia/PPTK dapat memverifikasi kualifikasi peserta yang diusulkan.
3. Untuk kegiatan baru atau kegiatan yang direvisi melalui APBD Perubahan sebaiknya persiapan pelaksanaan kegiatan hendaknya dimulai pada triwulan ke III, sehingga pada saat anggaran sudah disahkan, kegiatan langsung bisa dilaksanakan.
4. Diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya regulasi penyaluran KUR lebih sederhana sehingga dapat mempermudah UMKM dalam mengakses pembiayaan tersebut.

### **3.4.2 Prestasi Kerja**

Prestasi kerja yang dicapai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tahun anggaran 2017 berkat kerja keras dan kerjasama pihak terkait, seperti DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, seluruh SKPD di lingkungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terutama Dinas Perindagkop-UKM Kabupaten/Kota, seluruh elemen masyarakat dan mitra terkait (Perbankan, BUMN, Perguruan Tinggi dan LSM).

Prestasi kerja tingkat Nasional yang diraih ditahun 2017 diantaranya:

1. Hasanuddin, S.E., M.M. (Kepala Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)

## PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan peraturan ini maka pendekatan dalam menghitung capaian kinerja Instansi bukan lagi berdasarkan PKK dan PPS yang lebih pada capaian keluaran pada DPA tetapi lebih berorientasi pada capaian sasaran/target kinerja pada RPJMD.

Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2017 pada umumnya telah dapat dilaksanakan. Program kerja Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun dalam rangka mendukung terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Keberhasilan dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua komponen terkait. Keberhasilan-keberhasilan yang telah dicapai diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan, sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan dukungan dari berbagai pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja untuk menyempurnakan dokumen perencanaan periode yang akan datang, menyempurnakan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta menyempurnakan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan utama yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2016, yakni :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya.
2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung beserta staf telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Pencapaian sasaran strategis telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, bahkan ada beberapa yang capaian indikatornya melebihi 100%. Keberhasilan tersebut karena didukung oleh Dinas yang Membidangi Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota untuk menyukseskan program-program yang telah direncanakan sebelumnya, juga dengan instansi terkait seperti Pemda / Dinas / Lembaga Provinsi, Lembaga Perbankan, Perguruan Tinggi dan LSM.

4. Indikator sasaran yang telah dicapai, belum seluruhnya sesuai dengan yang diharapkan. Masih ada beberapa indikator yang belum tercapai secara maksimal, hal ini akan diupayakan secara maksimal untuk di raih pada tahun yang akan datang.

Pangkalpinang, Maret 2018

**KEPALA  
DINAS KOPERASI DAN UKM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

**Ir. Hj. ELFIYENA  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19620915 199003 2 001**